



Komitmen Indonesia dalam Mewujudkan Ekonomi Kelautan Berbasis *Blue Economy*

Aditya Dwi Nanda^{1*}, Eka Siwi Nurhayati¹, Novia Ayu Rizky¹

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

*Corresponding Author: adityadnanda10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komitmen Indonesia dalam mewujudkan ekonomi kelautan yang berbasis pada *Blue Economy*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik literature review, penelitian ini mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam sektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dari kegiatan perikanan harus dilakukan dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan, serta pentingnya penerapan ilmu dan teknologi dalam pengolahan limbah. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya perhatian terhadap usaha perikanan skala kecil dan menengah agar dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa integrasi program *Blue Economy* dengan industrialisasi perikanan dapat meningkatkan keberhasilan sektor perikanan di Indonesia, asalkan semua pihak terkait berkomitmen untuk mendukung inisiatif ini.

Kata Kunci: *Blue Economy*; Pengelolaan Limbah; Perikanan; Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia telah dikenal dengan potensi sumberdaya kelautannya yang melimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, yaitu 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Tentu ini merupakan keuntungan yang besar bagi Indonesia jika potensinya diolah secara optimal. Lestari (2013), mengungkapkan bahwa kekayaan sumberdaya alam hayati yang dimiliki oleh perairan Indonesia adalah 27,2% dari total spesies baik flora maupun fauna yang ada di seluruh dunia. 12% diantaranya merupakan mamalia, 23,8% amphibia, 31,8% reptilia, 44,7% ikan, 40% moluska, dan 8,6% rumput laut. Selain itu ada lagi sumberdaya minyak lepas pantai, sumber daya gas bumi, sumber daya pasir laut dan lain-lain.

Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut didukung oleh letak strategis Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan duna benua dan menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Lestari (2013), menyatakan bahwa hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung antara negara-negara Asia Pasifik, dan sekitar 75% dari barang-barang yang diperdagangkannya di transportasikan melalui laut terutama Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar US\$ 1.300 triliun setiap tahunnya. Selain itu, potensi sumberdaya perikanan baik budidaya maupun perikanan tangkap juga menyumbang peran yang besar bagi kegiatan ekonomi kelautan Indonesia. Produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya mencapai 22,9 juta ton. Apabila diolah dengan baik, maka akan semakin meningkat.

Perikanan sebagai kegiatan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu kegiatan ekonomi, perikanan seharusnya terus dimajukan dan dikembangkan serta menjadi prioritas agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini menuntut adanya inovasi dan kreativitas serta optimalisasi peran *stake holder*, dalam hal ini pemerintah, agar kegiatan perikanan tetap eksis dan bisa berkontribusi untuk kesejahteraan negara. Selain itu perikanan yang saat ini mengarah ke proses industrialisasi harus mampu menjaga keberlanjutan usaha dengan tetap



memperhatikan keseimbangan dan kelestarian perairan. Berdasarkan hal inilah maka muncul konsep *blue economy* yang pernah digagas oleh Cicip Sutardjo menteri kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan potensi kelautan sebagai penggerak ekonomi tidak hanya pada sumberdaya perikanan saja. Melainkan ada banyak sektor yang dapat menjadi mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Sektor-sektor tersebut antara lain dalam bidang perikanan, pariwisata pesisir, wisata bahari, transportasi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. Akan tetapi, pemanfaatan sumberdaya laut yang dilakukan tanpa ada kontrol yang benar akan menyebabkan kerusakan hingga kepunahan. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut tidak hanya menyebabkan degradasi lingkungan, kelangkaan sumberdaya, bahkan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi kelautan secara signifikan. Oleh sebab itu, perlu adanya adanya konsep yang mengatur pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan.

Melihat permasalahan tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya, salah satu diantaranya adalah menerapkan konsep ekonomi biru (*blue economy*) untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tepat ini dapat menciptakan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat berkelanjutan. Pembangunan ini harus mengedepankan laut sebagai sumber daya utamanya. Dimana potensi sumberdaya laut Indonesia lebih besar bila dibandingkan dengan daratan.

Blue economy merupakan simbol kegiatan industri khususnya industri perikanan yang pro lingkungan. Walaupun sebenarnya tanpa konsep ini, para pelaku usaha perikanan sudah seharusnya untuk menerapkan kegiatan yang sesuai dengan standar keamanan lingkungan. Bagi pelaku usaha yang secara pemikiran sudah maju ataupun skala usahanya sudah sangat mapan penyelenggaraan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan adalah sebuah hal wajib yang harus dilakukan. Disamping karena kesadaran pribadi, hal lain yang menjadi penyebab adalah tuntutan pasar (pembeli) yang sering mempersyaratkan kegiatan perikanan harus pro lingkungan, namun bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pemikiran kearah tersebut belum menjadi prioritas. Maka menjadi sebuah tugas besar bagi pihak-pihak terkait terutama kalangan pencetus program *blue economy* untuk peduli dan memperhatikan serta mengangkat usaha perikanan terutama skala kecil dan menengah agar usahanya semakin pro ekosistem. Jika hal ini dapat terwujud maka *blue economy* yang terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan akan semakin berhasil dan memajukan sektor perikanan.

Penerapan konsep *blue economy* di Indonesia berdasarkan fakta bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis dengan Negara Kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sehingga perlu untuk di pikirkan bagaimana cara untuk melestarikan potensi kekayaan sumberdaya kelautan yang dimiliki sehingga tetap dapat di manfaatkan secara berkelanjutan. Ekonomi biru erat kaitanya dengan sektor-sektor berbasis perairan dan kelautan seperti sektor perikanan, transportasi dan pariwisata. Keberlangsungan hidup biota laut yang menjadi bahan makanan dan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut merupakan fokus utama ekonomi.

Fakta bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang melimpah sayangnya tidak tercerminkan dengan konsisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan. Pendekatan ekonomi biru menitik beratkan pada inverstasi kreatif dan inovatof yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Akan tetapi, untuk dapat mengimplementasikannya pemerintah perlu memberikan pendampingan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan serta menjaga lingkungan mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik literature review. Pendekatan kualitatif dalam literature review digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan meta sisntesis, teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002).

Studi literature review dipakai untuk menghimpun data atau sebuah sintesa sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Nursalam, 2016). Literature review adalah suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004). Studi sendiri (individual study) merupakan bentuk studi primer (primary study), sedangkan literature review adalah studi sekunder (secondary study). Literature review akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Blue Economy

Blue ekonomi merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan sekaligus meningkatkan kegiatan perekonomian kelautan dan tetap mempertahankan dan menjamin keberlanjutan ekosistem. Nurhayati (2013), menambahkan bahwa blue ekonomi merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan. Namun merupakan suatu lompatan besar dalam pembangunan dengan meninggalkan praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek serta menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*). Model pendekatan blue ekonomi mampu menjawab ketergantungan antar ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif C. Sutardjo mengungkapkan bahwa istilah ekonomi biru merupakan sebuah pemikiran atau paradigma yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya dan menjaga lingkungan di bidang kelautan dan perikanan (Prayuda dan Sary, 2019).

Rani dan Cahyasari (2015), blue ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli, seorang pendiri dan aktivis *Zero Emission Research Initiative (ZERI)* melalui bukunya yang berjudul "*The Blue Economy*" dengan landasan konsepsi "*The Blue Economy: 10 Years, 100 innovations, and 100 million jobs*". Model blue ekonomi dimaksudkan untuk menunjukkan kepada para interpreneur, bahwa *blue economy business model* memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi sosial, dan lingkungan karena sistem ini menggunakan sumber daya alam yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien dan bersih, menghasilkan produk ekonomi yang lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil.

Jadi, konsep blue ekonomi merupakan pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumberdaya kelautan dengan upaya pengelolaan lingkungan yang optimal namun tetap berkelanjutan. Sehingga diharapkan terjadi kenaikan nilai ekonomi namun sumberdaya kelautan tetap lestari dan dapat di manfaatkan dalam jangka panjang. Sehingga penerapan konsep Blue ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Blue economy merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep blue ekonomi mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari *blue economy* ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum. Limbah, baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem, oleh sebab itu, maka perlu ada ilmu dan teknologi

dalam *men-treatment* keluaran limbah. Pendapat tersebut didukung oleh Yusuf (2012) dalam Nurhayati (2013), bahwa ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan *triple track strategy* yaitu program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan), *Pro-job* (melestarikan lingkungan). Dapat dikatakan bahwa konsep ekonomi biru ini menerapkan logika ekosistem, dimana ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan energi dan nutrien tanpa menyisakan limbah untuk memenuhi kebutuhan semua kontributor dalam satu sistem. Selain itu ekonomi biru menitik beratkan pada kreativitas, inovasi, efisiensi sistem produksi dan penataan sistem manajemen sumberdaya.

Prayuda dan Sary (2019), menambahkan bahwa konsep ekonomi biru merupakan pemahaman baru yang mendorong perubahan pola dan struktur pembangunan melalui pemanfaatan lingkungan sehingga ini merupakan sepak terjal bagi pembangunan dan lompatan baru untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan keuntungan jangka pendek dan menggunakan *low carbon economy* atau ekonomi yang rendah karbon sehingga model dan konsep pendekatan blue ekonomi nantinya diharapkan mampu meminimalisir interdependensi antara ekosistem dan ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip blue ekonomi menurut Rani dan Cahyasaki (2015) adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi alam (*nature's efficiency*), ekonomi biru mencontoh pada alam (ekosistem), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan oleh alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*)
2. Nir limbah (*zero waste*), dimana limbah dari hasil industri dirubah menjadi makanan atau sumber energi bagi yang lain sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi kemudian didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrient dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan perikanan dan kelautan seharusnya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui diversifikasi kegiatan ekonomi sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk yang dapat menjadi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.

Haris (2000) dalam Saefuddin (2014), memandang bahwa konsep keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan antar sektor yang dapat menghancurkan produksi pertanian dan industri
2. Keberlanjutan lingkungan/ekologi. Sistem keberlanjutan lingkungan harus mampu menjaga kestabilan sumberdaya alam, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan. Konsep ini juga melibatkan pemeliharaan biodiversitas, stabilitas atmosfer, dan fungsi-fungsi ekosistem yang tidak dikategorikan sebagai sumberdaya ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial didefinisikan sebagai suatu sistem yang mampu untuk mencapai kualitas, menyediakan pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, akuntabilitas gender dan politik.

Pentingnya Konsep Blue Ekonomi bagi Pembangunan Ekonomi Kelautan

Pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan memberikan dampak buruk dalam jangka panjang. Apabila tidak dikelola dengan benar, maka akan menimbulkan bencana besar hingga menyebabkan krisis sumberdaya dan krisis ekonomi. Ketika sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan sudah tidak lagi seimbang dan tidak lagi mampu menampung serta memfasilitasi kegiatan dan kebutuhan penduduk, maka otomatis kehidupan kita dan kehidupan generasi yang akan datang akan terancam karena adanya kerusakan lingkungan. Maka agar hal tersebut tidak terjadi,

diperlukan pemahaman, kesadaran, dan pemberdayaan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Disinilah konsep ekonomi biru memegang peranan penting. Nurhayati (2013), prinsip ekonomi biru dinilai dapat membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut.

Prinsip-prinsip ekonomi biru tersebut diklaim dapat menjadi kunci emas dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Langkah kongkret dari penerapan konsep ekonomi biru antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman yang jelas tentang nilai ekosistem laut
2. Mengaitkan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, ini terkait dengan kesinambungan bahan pangan dengan strategi ekonomi serta sosial pembangunan
3. Transisi ekonomi dalam potensi ekonomi menyangkut pasar, industri, dan komunitas terhadap pola pembangunan yang lebih berkeadilan.

Saat ini dunia mengalami krisis energi dan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya secara besar-besaran dan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut tentu akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Ditengah kerumitan tersebut, konsep blue ekonomi hadir sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada konsekuensi atau efek samping lain yang akan di hadapi. Hal tersebut dikarenakan konsep blue ekonomi berbeda dengan konsep ekonomi eksploratif yang diterapkan sebelumnya.

Blue ekonomi hadir sebagai konsep ideal dan berkelanjutan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan konservatif. Konsep ini didasari oleh tiga pilar yaitu profit, people dan planet. Jadi dengan konsep blue ekonomi, semua tujuan akan tercapai baik itu keuntungan secara finansial, maupun terciptanya energi baru sebagai tujuan utama namun tetap mementingkan kelestarian alam sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sektor ekonomi kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya yang melimpah dan menjanjikan sehingga konsep blue ekonomi merupakan aspek yang penting yang harus diterapkan di Indonesia. Sumberdaya yang melimpah tersebut akan menarik perhatian pelaku industri karena dipandang menjanjikan dan dapat memberikan keuntungan. Hal tersebut dapat menjadi peluang terciptanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dapat mengatasi tingginya angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan mengembangkan sektor ekonomi kelautan, maka akan tercipta pusat-pusat kemakmuran yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut dapat memecahkan permasalahan bangsa Indonesia.

Peran Konsep Blue Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia

Menjadi negara yang memiliki potensi laut yang besar tidak serta merta membuat Indonesia bebas dari berbagai permasalahan. Pada faktanya, itu menjadi permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Indonesia harus menerima fakta bahwa potensi sumberdaya yang ada tidak tercermin oleh taraf hidup masyarakat pesisir yang notabennya merupakan pelaku kegiatan ekonomi kelautan. Seharusnya kekayaan sumberdaya tersebut justru membuat masyarakat pesisir memiliki pendapatan yang besar dan taraf hidup yang baik. Akan tetapi faktanya berkebalikan dari itu. Belum lagi permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan yang telah di eksploitasinya. Tantangan yang sedang dihadapi pemerintah di lingkungan pesisir antara lain:

1. Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang tinggi
2. Maraknya perbuatan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bertanggung jawab
3. Lunturnya norma dan nilai budaya
4. Rendahnya integritas dan kemandirian organisasi sosial di wilayah pesisir
5. Minimnya sarana infrastruktur dan unit kesehatan di lingkungan pesisir.

Untuk itu muncul konsep ekonomi biru yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Untuk menerapkan konsep tersebut, perlu adanya upaya ekstra yang harus dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kembali rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu masyarakat juga perlu diajarkan untuk menaggulangi *exploitation risk* yang menjadi masalah selama ini dan menunjukkan sebagaimana sumber daya alam harus digunakan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan permasalahan baru hingga berujung pada krisis pangan dan krisis ekonomi.

Pengaplikasian konsep Blue ekonomi di wilayah pesisir akan memberikan poin lebih dan berpengaruh dalam pembangunan nasional, selain itu juga pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan nasional merupakan basis utama yang diharapkan dapat terwujud (Prayuda dan Sary, 2019). Penerapan konsep blue ekonomi diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi potensi besar bagi masyarakat pesisir apabila pemerintah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir untuk mengelola dan menikmati sumber daya alam yang ada dengan tetap tidak merusak nilai-nilai ekosistem yang ada.

Dengan kata lain, konsep ekonomi biru ini tidak hanya ramah lingkungan melainkan dapat memberikan keuntungan berlipat bagi masyarakat. Limbah-limbah hasil industri dapat di olah kembali menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti contoh pemanfaatan limbah kulit kerang yang dibuang begitu saja oleh nelayan atau pabrik sehingga dapat mencemari lingkungan. Dengan sedikit kreativitas dapat diolah lagi menjadi kerajinan yang cantik dan bernilai jual tinggi.

Pemanfaatan tersebut tidak hanya dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melainkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Blue ekonomi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan dengan bekerja sama dalam pengembangan anatar stakeholder dan masyarakat di wilayah pesisir (Prayuda dan Sary, 2019). Penerapan blue ekonomi di Indonesia tidak bertabrakan dengan green ekonomi yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Kedua konsep tersebut justru melebur menjadi satu menjadi Konsep *Blue and Green Economy* (BGE). Konsep BGE hadir sebagai konsep ekonomi yang ideal dan berkelanjutan berbasis manivestasi alam dengan lebih baik.

"*Blue and Green Economy* (BGE)" merupakan hal yang penting karena sektor ekonomi kelautan dan perikanan merupakan sumber daya yang berlimpah yang menjanjikan usaha-usaha yang menguntungkan dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan kata lain pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat mengatasi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan mengembangkan sektor ekonomi kelautan, maka akan tercipta pusat-pusat kemakmuran yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Ini dapat memecahkan permasalahan kronis bangsa berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah, '*brain drain*', dan urbanisasi. Konsep '*sustainability development with equity*' (pembangunan berkelanjutan dengan kesetaraan) menjadi pegangan Indonesia dan menjiwai semua perencanaan pembangunan. Dalam penerapan konsep BE dan GE dalam perencanaan pembangunan Indonesia memiliki tujuan akhir pada peningkatan pendapatan, yang juga berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Penjelasan di muka mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya hayati secara seimbang agar terjamin keberlangsungannya (*sustainable*), dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (*community welfare*).

Korelasi antara peran pemerintah dengan masyarakat pesisir diharapkan mampu mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan budaya maritim guna merealisasikan kejayaan dan kesejahteraan perairan laut dan tetap menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap sumberdaya laut. Prayuda dan Sary (2019) menambahkan, bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat mengenai sektor maritim, dapat memicu keberhasilan MEA sehingga dapat segera menjadikan Indonesia sebagai *Global Potential Market*. Karena Indonesia tidak hanya sebagai konsumen melainkan sebagai pengekspor. Menurut Ghalidza (2020), dapat ditarik beberapa point terkait dengan dampak konsep blue ekonomi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai berikut:

1. Konsep ini mengedepankan peningkatan produksi kelautan

2. Dalam penerapannya produktivitas kelautan akan menjadi sektor utama dalam sumbangan pendapatan nasional
3. Jumlah produksi perikanan yang sangat berlimpah dapat digunakan sebagai komoditas ekspor yang akan menghasilkan devisa
4. Dengan berkembangnya sektor kelautan dalam konsep ekonomi biru tidak saja sektor perikanan, namun sektor lain juga akan ikut terdorong karena potensi kelautan Indonesia meliputi sumberdaya hayati dan non hayati seperti minyak bumi dan bahan-bahan tambang yang lain yang dapat berkontribusi tinggi dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi
5. Blue ekonomi dapat menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena bersifat ramah lingkungan dan mengedepankan keberlangsungan ekosistem.

Pemerintah tentu memiliki peran dalam pelaksanaan konsep ekonomi biru ini. Peran tersebut juga akan mempengaruhi hasil dari implementasi konsep ekonomi biru bagi kegiatan perekonomian kelautan. Peran pemerintah tersebut antara lain:

1. Memonitor keamanan produk yang diperdagangkan baik lokal maupun global
2. Kebijakan dan peraturan perundangan yang mendorong penemuan inovasi dan investasi pada industri kreatif
3. Kebijakan untuk bekerja sama antara pihak yang efektif.

Secara tinjauan akademis, pilar pembangunan kemaritiman dan kelautan mencakup aspek Budaya Kelautan (*Ocean Culture*), Tata Kelola Kelautan (*Ocean Governance*), Keamanan Maritime (*Maritime Security*), Ekonomi Kelautan (*Ocean Economic*), Lingkungan Laut (*Marine Environment*). Lingkup Pembangunan kemaritiman dan kelautan yang luas ini mencakup aspek nonfisik dan fisik. Aspek non fisik diantaranya terkait dengan pembangunan budaya bahari dan tata kelola laut. Sedangkan pembangunan fisik mencakup aspek ekonomi kelautan, lingkungan laut dan keamanan laut. Keduanya aspek tersebut perlu dikembangkan secara Bersama sehingga esensi pembangunan kemaritiman bisa terwujud secara holistik. Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekonomi laut yang berkelanjutan, atau ekonomi biru.

Laporan Bank Dunia terbaru yang berjudul Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia, menjelaskan tentang status, tren, dan peluang menuju ekonomi biru di Indonesia. Dalam laporan tersebut, rekomendasi disajikan berdasarkan upaya dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan tersebut juga memaparkan bahwa masa depan sektor kelautan bergantung kepada aset alam ekosistem laut dan pesisir yang sehat. Dalam kegiatan sehari-hari masalah strategi merupakan masalah yang sangat urgen, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, setelah dijabarkan tujuan yang hendak dicapai. Hal demikian terjadi dalam setiap organisasi atau lembaga, dimana tidak terlepas dari penetapan strategi, yang berbeda hanyalah apakah strategi itu tepat, berjalan dengan baik, efisien, dan efektif atau memenuhi semua unsur yang perlu diperhatikan dalam hal penerapannya. .

KESIMPULAN

Sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya kelautan yang besar, Indonesia harus mampu memikirkan pengelolaan yang tepat sehingga tidak menyebabkan kerusakan di kemudian hari. Konsep *blue ekonomi* sangat cocok apabila diterapkan di wilayah Indonesia, melihat kondisi geografis Indonesia. Konsep ini menawarkan pengelolaan sumberdaya alam dan meningkatkan kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga dan merawat lingkungan. *Blue Economy* yaitu konsep pembangunan ekonomi yang tepat. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir dan lautan. Prinsip *Blue Economy* menggunakan bahan baku dari alam secara efisien, tidak menyisakan limbah, memberikan dampak sosial yang luas. sistem produksi berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta kaya inovasi dan adaptasi teknologi ramah lingkungan. Untuk implementasi *Blue Economy* pada wilayah pesisir dan pulau kecil, ada mina wisata yaitu pemberdayaan masyarakat lokal

dengan program penyerapan tenaga kerja lokal, souvenir berbahan baku sampah, inovasi dan teknologi ramah lingkungan, dan banyak. Dengan beberapa hal itulah dapat dengan mudah melaksanakan *Blue Economy* yang akan mensejahterakan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari penerapan *Blue Economy* penambahan nilai ekonomis dengan *zero waste*, akan membuka peluang usaha baru dan berbanding lurus dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Seluruh bahan baku yang dimanfaatkan tidak akan menimbulkan limbah sehingga keberlangsungan usaha dan sumber daya alam terjamin.

Selain itu, dalam rangka memastikan terwujudnya *blue economy* di Indonesia, maka kepemimpinan strategis dalam komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi kelautan yang berbasis *blue economy* juga menjadi faktor yang penting. Dalam merencanakan masa depan khususnya komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi kelautan yang berbasis *blue economy*, kepemimpinan strategis memerlukan visi misi strategi. Visi memberikan konsep menyeluruh yang berfungsi untuk memulai dan kemudian menentukan tujuan, rencana, dan program dalam komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi kelautan yang berbasis *blue economy*. Visi Indonesia menuju negara maritim yang kuat merupakan pilihan strategis bangsa ke depan. Terdapat usulan empat strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru: yaitu: (1) peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, terumbu karang); (2) mobilisasi insentif dan investasi; (3) sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data; dan (4) membangun kembali dengan "lebih biru" setelah pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghalidza, Nota Morra Banu. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XXII (1).
- Kitchenham. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. United Kingdom: Keele University Technical Report.
- Lestari. (2013). Potensi dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dalam Penciptaan Masyarakat Pesisir yang Siap Menjawab Perkembangan Zaman. *Jurnal Selat*. Vol. I (1).
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic Reviews: The Experiences of a PhD Student. *Psychology Learning & Teaching*, 2(1), 32-35. <https://doi.org/10.2304/plat.2002.2.1.32>
- Nurhayati, Siti. (2013). Blue and Economy Policy and The Impact to Indonesia Community Welfare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XII (1).
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika
- Prayuda, Rendi dan Sary, Dian Venita. (2019). Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*. Vol. III (2).
- Rani, Faisyal dan Cahyasaki, Wulandari. (2015). Motivasi Indonesia dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Ekonomi Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*. Vol. VII (1).
- Saefuddin, Asep. (2014). Perguruan Tinggi, Peran Pemerintah dan Pengembangan Blue Economy. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. I (3).